



PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4	Pendapatan Daerah	1.733.155.793.438,88	
4.1	Pendapatan Asli Daerah	210.207.034.053,88	
4.1.1	Pajak Daerah	1.016.094.300,00	
4.1.1.01	Pajak Hotel	434.094.300,00	
4.1.1.01.01	Hotel Maranu, Hotel Anggrek	80.000.000,00	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.12	Losmen/Rumah/Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos	304.094.300,00	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.15	Hotel Pemda ASEDU	50.000.000,00	Dasar Hukum : Surat Perjanjian Sewa No. 900/695/BUP/VI/2016 Tanggal 22 Juni 2016
4.1.1.02	Pajak Restoran	84.000.000,00	
4.1.1.02.01	Restoran	84.000.000,00	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.03	Pajak Hiburan	18.000.000,00	
4.1.1.03.10	Pemainan Bilyar	18.000.000,00	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.04	Pajak Reklame	80.000.000,00	
4.1.1.04.01	Reklame papan	80.000.000,00	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	200.000.000,00	
4.1.1.12.01	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	200.000.000,00	
4.1.1.13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	200.000.000,00	
4.1.1.13.01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	200.000.000,00	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan
4.1.2	Retribusi Daerah	7.346.027.000,00	
4.1.2.01	Retribusi jasa umum	5.777.610.000,00	

RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman ke 1 dari 20

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4 . 1 . 2 . 01 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.350.000.000,00	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Asmat No. 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Dasar Hukum : Perpres No. 19 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan
4 . 1 . 2 . 01 . 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	437.580.000,00	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
4 . 1 . 2 . 01 . 05	Retribusi Pelayanan parkir di tepi jalan umum	583.800.000,00	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4 . 1 . 2 . 01 . 06	Retribusi pelayanan pasar	362.880.000,00	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4 . 1 . 2 . 01 . 07	Retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor	31.800.000,00	
4 . 1 . 2 . 01 . 14	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	11.550.000,00	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4 . 1 . 2 . 02	Retribusi jasa usaha	806.417.000,00	

RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman ke 2 dari 20

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	395.922.000,00	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Surat Perjanjian No. 030/1062/SETDA/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016 tentang Sewa Pakai Bangunan/Gedung Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Surat Perjanjian No. 030/791/SETDA/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Surat Perjanjian No. 030/858/SETDA/VII/2016 tanggal 21 Juli 2016 Dasar Hukum : Surat Perjanjian No. 030/562/SETDA/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Sewa Pakai Bangunan/Gedung
4 . 1 . 2 . 02 . 05	Retribusi tempat khusus parkir	21.600.000,00	
4 . 1 . 2 . 02 . 09	Retribusi Pelayanan pelabuhan	372.595.000,00	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
4 . 1 . 2 . 02 . 15	Retribusi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Omor	5.000.000,00	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
4 . 1 . 2 . 02 . 16	Retribusi Pengukuhan / Perpanjangan Dealer Sepeda Elektrik	3.000.000,00	
4 . 1 . 2 . 02 . 17	Retribusi Izin Usaha Bengkel	8.300.000,00	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
4 . 1 . 2 . 03	Retribusi perizinan tertentu	762.000.000,00	
4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	100.000.000,00	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Asmat No.8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
4 . 1 . 2 . 03 . 03	Retribusi Izin Gangguan/keramaian	600.000.000,00	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman ke 3 dari 20

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4 . 1 . 2 . 03 . 05	Retribusi Izin usaha perikanan	62.000.000,00	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
4 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	9.000.000.000,00	
4 . 1 . 3 . 01	Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah / BUMD	9.000.000.000,00	
4 . 1 . 3 . 01 . 03	Laba penyertaan modal pada Bank Papua	9.000.000.000,00	
4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	192.844.912.753,88	
4 . 1 . 4 . 01	Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	250.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 01 . 02	penjualan peralatan/perlengkapan kantor tidak terpakai	200.000.000,00	Dasar Hukum : Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
4 . 1 . 4 . 01 . 06	penjualan kendaraan dinas roda empat	50.000.000,00	Dasar Hukum : Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
4 . 1 . 4 . 02	jasa giro	19.950.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 02 . 01	Jasa Giro Kas Daerah	19.000.000.000,00	Dasar Hukum : Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2008
4 . 1 . 4 . 02 . 02	Jasa Giro Pemegang Kas	600.000.000,00	Dasar Hukum : Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2008
4 . 1 . 4 . 02 . 04	Jasa Giro Yayasan/Lembaga/Organisasi	50.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 02 . 06	Jasa Giro dari Rekening Kampung	300.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 03	Pendapatan bunga	19.964.849.550,00	
4 . 1 . 4 . 03 . 01	Penerimaan Bunga Deposito pada Bank Papua	13.964.849.550,00	Dasar Hukum : SK Bupati No. 68 Tahun 2017 tentang Penempatan Deposito Pemerintah Kabupaten Asmat pada Bank Papua Cabang Agats
4 . 1 . 4 . 03 . 02	Penerimaan Bunga Deposito pada Bank BRI Asmat	6.000.000.000,00	Dasar Hukum : SK Bupati No. 67 Tahun 2017 tentang Penempatan Deposito Pemerintah Kabupaten Asmat pada Bank BRI Unit Agats
4 . 1 . 4 . 04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	36.250.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 04 . 01	Kerugian Uang Daerah	36.000.000.000,00	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Asmat No. 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan MP-TPTGR Kab. Asmat
4 . 1 . 4 . 04 . 02	Kerugian Barang Daerah	250.000.000,00	Dasar Hukum : Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4 . 1 . 4 . 06	Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	343.210.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4 . 1 . 4 . 06 . 01	Bidang pendidikan	50.000.000,00	Dasar Hukum : Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4 . 1 . 4 . 06 . 03	Bidang pekerjaan umum	50.000.000,00	Dasar Hukum : Peraturan Presiden RI No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4 . 1 . 4 . 06 . 04	Bidang perumahan rakyat	30.000.000,00	Dasar Hukum : Peraturan Presiden RI No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4 . 1 . 4 . 06 . 07	bidang perhubungan	150.000.000,00	Dasar Hukum : Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4 . 1 . 4 . 06 . 20	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrsi Keuda, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	13.210.000,00	Dasar Hukum : Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4 . 1 . 4 . 06 . 26	Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	50.000.000,00	Dasar Hukum : Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4 . 1 . 4 . 07	Pendapatan denda pajak	6.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 07 . 01	Pendapatan denda pajak hotel	1.500.000,00	
4 . 1 . 4 . 07 . 02	Pendapatan denda pajak restoran	1.500.000,00	
4 . 1 . 4 . 07 . 03	Pendapatan denda pajak hiburan	1.500.000,00	
4 . 1 . 4 . 07 . 12	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1.500.000,00	
4 . 1 . 4 . 08	Pendapatan denda retribusi	4.500.000,00	
4 . 1 . 4 . 08 . 01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	1.500.000,00	
4 . 1 . 4 . 08 . 02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	1.500.000,00	
4 . 1 . 4 . 08 . 03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	1.500.000,00	
4 . 1 . 4 . 11	Fasilitas sosial dan fasilitas umum	2.559.700.000,00	
4 . 1 . 4 . 11 . 05	Penerimaan sewa kamar dan gedung hotel Pemda ASEDU	375.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 11 . 06	Pemakaian Kapal Fumiripits	18.000.000,00	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Asmat No. 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4 . 1 . 4 . 11 . 07	Pemakaian Kapal SE-OS	9.000.000,00	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Asmat No. 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4 . 1 . 4 . 11 . 17	Pemakaian Kapal Sirmanci	11.700.000,00	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Asmat No. 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4 . 1 . 4 . 11 . 22	Penerimaan Kapal KM. Siret	6.000.000,00	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Asmat No. 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman ke 5 dari 20

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4 . 1 . 4 . 11 . 25	Penerimaan Sewa Hotel Pemda Neo ASEDU Timika	500.000.000,00	Dasar Hukum : Surat Kerjasama No. 030/41/BUP/ASMAT/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Kerjasama Pemanfaatan Gedung Hotel Asmat Bersinar
4 . 1 . 4 . 11 . 26	Pemakaian Sewa Longboat	50.000.000,00	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Asmat No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
4 . 1 . 4 . 11 . 27	Penerimaan Sewa Home Stay	30.000.000,00	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
4 . 1 . 4 . 11 . 28	Pemakaian Kapal KM. 001	60.000.000,00	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Asmat No. 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4 . 1 . 4 . 11 . 29	Penerimaan Hasil MoU dengan PLN Ranting Agats	1.500.000.000,00	Dasar Hukum : MoU Pihak Pertama No. 530/292.a/BUP/II/2017 dan Pihak Kedua No. 001.Kjs/040/Area TMK/2017
4 . 1 . 4 . 15	Pendapatan Lain - lain	110.316.653.203,88	
4 . 1 . 4 . 15 . 01	Pendapatan Lain - lain	110.316.653.203,88	
4 . 1 . 4 . 16	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	3.200.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 16 . 01	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	3.200.000.000,00	Dasar Hukum : Perpres No. 19 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan
4 . 2	Dana Perimbangan	1.101.689.643.000,00	
4 . 2 . 1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	37.770.788.000,00	
4 . 2 . 1 . 01	Bagi hasil pajak	12.567.678.000,00	
4 . 2 . 1 . 01 . 04	Bagi hasil dari pajak penghasilan (PPh) pasal 21	3.404.913.000,00	Dasar Hukum : Informasi Website DJPK tentang Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) APBN Tahun Anggaran 2019
4 . 2 . 1 . 01 . 05	Alokasi Biaya Pemungutan PBB Bagian daerah & Dana Bagi Hasil PBB Bagian Daerah	9.162.765.000,00	Dasar Hukum : Informasi Website DJPK tentang Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) APBN Tahun Anggaran 2019
4 . 2 . 1 . 02	Bagi hasil bukan pajak / sumber daya alam	25.203.110.000,00	
4 . 2 . 1 . 02 . 02	Bagi hasil dari provinsi sumber daya hutan	751.979.000,00	Dasar Hukum : Informasi Website DJPK tentang Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) APBN Tahun Anggaran 2019
4 . 2 . 1 . 02 . 05	Bagi hasil dari iuran Eksplorasi dan iuran eksploitasi (Royalti)	23.467.538.000,00	
4 . 2 . 1 . 02 . 06	Bagi hasil dari pungutan hasil pengusahaan perikanan	983.593.000,00	Dasar Hukum : Informasi Website DJPK tentang Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) APBN Tahun Anggaran 2019
4 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	913.225.697.000,00	
4 . 2 . 2 . 01	Dana alokasi umum	913.225.697.000,00	
4 . 2 . 2 . 01 . 01	Dana Alokasi Umum	913.225.697.000,00	Dasar Hukum : Informasi Website DJPK tentang Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) APBN Tahun Anggaran 2019
4 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	150.693.158.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4 . 2 . 3 . 01	Dana Alokasi Khusus Fisik	106.202.390.000,00	
4 . 2 . 3 . 01 . 02	DAK Pendidikan	14.322.741.000,00	Dasar Hukum : Informasi Website DJPK tentang Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) APBN Tahun Anggaran 2019 Dasar Hukum : Informasi Website DJPK tentang Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) APBN Tahun Anggaran 2019 Dasar Hukum : Informasi Website DJPK tentang Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) APBN Tahun Anggaran 2019 Dasar Hukum : Informasi Website DJPK tentang Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) APBN Tahun Anggaran 2019
4 . 2 . 3 . 01 . 03	DAK Kesehatan	20.010.777.000,00	Dasar Hukum : Informasi Website DJPK tentang Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) APBN Tahun Anggaran 2019 Dasar Hukum : Informasi Website DJPK tentang Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) APBN Tahun Anggaran 2019 Dasar Hukum : Informasi Website DJPK tentang Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) APBN Tahun Anggaran 2019
4 . 2 . 3 . 01 . 04	DAK Infrastruktur Jalan	44.035.375.000,00	Dasar Hukum : Informasi Website DJPK tentang Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) APBN Tahun Anggaran 2019 Dasar Hukum : Informasi Website DJPK tentang Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) APBN Tahun Anggaran 2019
4 . 2 . 3 . 01 . 06	DAK Infrastruktur Air Minum	2.584.496.000,00	Dasar Hukum : Informasi Website DJPK tentang Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) APBN Tahun Anggaran 2019
4 . 2 . 3 . 01 . 07	DAK Infrastruktur Sanitasi	3.799.986.000,00	Dasar Hukum : Informasi Website DJPK tentang Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) APBN Tahun Anggaran 2019 Dasar Hukum : Informasi Website DJPK tentang Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) APBN Tahun Anggaran 2019
4 . 2 . 3 . 01 . 09	DAK Kelautan dan Perikanan	1.047.135.000,00	Dasar Hukum : Informasi Website DJPK tentang Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) APBN Tahun Anggaran 2019
4 . 2 . 3 . 01 . 10	DAK Pertanian	4.306.598.000,00	Dasar Hukum : Informasi Website DJPK tentang Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) APBN Tahun Anggaran 2019
4 . 2 . 3 . 01 . 18	DAK Perumahan dan Permukiman	5.950.707.000,00	Dasar Hukum : Informasi Website DJPK tentang Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) APBN Tahun Anggaran 2019
4 . 2 . 3 . 01 . 21	DAK Transportasi Perhubungan	10.144.575.000,00	Dasar Hukum : Informasi Website DJPK tentang Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) APBN Tahun Anggaran 2019

RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman ke 7 dari 20

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4 . 2 . 3 . 02	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	44.490.768.000,00	
4 . 2 . 3 . 02 . 01	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	91.500.000,00	Dasar Hukum : Informasi Website DJPK tentang Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) APBN Tahun Anggaran 2019 Dasar Hukum : Informasi Website DJPK tentang Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) APBN Tahun Anggaran 2019
4 . 2 . 3 . 02 . 02	Tunjangan Profesi Guru	5.557.010.000,00	Dasar Hukum : Informasi Website DJPK tentang Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) APBN Tahun Anggaran 2019
4 . 2 . 3 . 02 . 03	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	549.000.000,00	Dasar Hukum : Informasi Website DJPK tentang Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) APBN Tahun Anggaran 2019
4 . 2 . 3 . 02 . 04	Tunjangan Khusus Guru	10.621.499.000,00	Dasar Hukum : Informasi Website DJPK tentang Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) APBN Tahun Anggaran 2019
4 . 2 . 3 . 02 . 05	Bantuan Operasional Kesehatan	17.339.978.000,00	Dasar Hukum : Informasi Website DJPK tentang Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) APBN Tahun Anggaran 2019
4 . 2 . 3 . 02 . 06	Akreditasi Rumah Sakit	620.000.000,00	Dasar Hukum : Informasi Website DJPK tentang Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) APBN Tahun Anggaran 2019
4 . 2 . 3 . 02 . 07	Akreditasi Puskesmas	981.124.000,00	
4 . 2 . 3 . 02 . 08	Jaminan Persalinan	1.585.000.000,00	Dasar Hukum : Informasi Website DJPK tentang Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) APBN Tahun Anggaran 2019
4 . 2 . 3 . 02 . 09	Bantuan Operasional KB	5.376.956.000,00	Dasar Hukum : Informasi Website DJPK tentang Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) APBN Tahun Anggaran 2019
4 . 2 . 3 . 02 . 10	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.768.701.000,00	Dasar Hukum : Informasi Website DJPK tentang Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) APBN Tahun Anggaran 2019
4 . 3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	421.259.116.385,00	
4 . 3 . 1	Pendapatan hibah	16.519.846.921,00	
4 . 3 . 1 . 02	Pendapatan hibah dari pemerintah daerah lainnya	16.000.000.000,00	
4 . 3 . 1 . 02 . 02	Pemerintah Provinsi Papua	16.000.000.000,00	
4 . 3 . 1 . 03	Pendapatan hibah dari badan / lembaga / organisasi swasta dalam negeri	519.846.921,00	
4 . 3 . 1 . 03 . 01	Badan/lembaga/Organisasi swasta€	519.846.921,00	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sumbangan Pihak Ketiga
4 . 3 . 3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintahan daerah lainnya	8.034.299.840,00	
4 . 3 . 3 . 01	Dana bagi hasil pajak dari provinsi	8.034.299.840,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4 . 3 . 3 . 01 . 01	Bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor	624.439.924,00	Dasar Hukum : Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua No. 973/0014/BAPENDA Tanggal 10 Januari 2018
4 . 3 . 3 . 01 . 03	Bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor	500.506.293,00	Dasar Hukum : Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua No. 973/0014/BAPENDA Tanggal 10 Januari 2018
4 . 3 . 3 . 01 . 05	Bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor	2.325.856.207,00	Dasar Hukum : Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua No. 973/0014/BAPENDA Tanggal 10 Januari 2018
4 . 3 . 3 . 01 . 07	Bagi hasil dari pajak pengambilan dari pemanfaatan air permukaan	5.172.414,00	Dasar Hukum : Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua No. 973/0014/BAPENDA Tanggal 10 Januari 2018
4 . 3 . 3 . 01 . 08	Bagi hasil dari pajak rokok	4.578.325.002,00	Dasar Hukum : Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua No. 973/0014/BAPENDA Tanggal 10 Januari 2018
4 . 3 . 4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	352.646.849.624,00	
4 . 3 . 4 . 02	Dana otonomi khusus	105.685.585.624,00	
4 . 3 . 4 . 02 . 01	Dana otonomi khusus	105.685.585.624,00	Dasar Hukum : SK Gubernur Papua No. 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota Se-Propinsi Papua Tahun Anggaran 2017
4 . 3 . 4 . 03	Dana Desa	246.961.264.000,00	
4 . 3 . 4 . 03 . 01	Dana Desa	246.961.264.000,00	Dasar Hukum : Informasi Website DJPK tentang Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) APBN Tahun Anggaran 2019
4 . 3 . 5	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	44.058.120.000,00	
4 . 3 . 5 . 01	Bantuan keuangan dari Provinsi Papua	44.058.120.000,00	
4 . 3 . 5 . 01 . 01	Bantuan keuangan dari provinsi	44.058.120.000,00	Dasar Hukum : SK Gubernur Nomor 900/1569/SET
5	Belanja	1.733.144.249.977,88	
5 . 1	Belanja Tidak Langsung	780.593.849.970,49	
5 . 1 . 1	Belanja pegawai	371.336.656.842,83	
5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan tunjangan	200.059.590.816,83	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	116.844.989.298,83	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	14.153.793.588,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	7.989.180.500,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	4.795.778.900,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	23.075.204.075,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	8.295.940.400,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPH / Tunjangan Khusus	816.473.520,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	73.662.000,00	
5.1.1.01.10	Uang paket	48.132.000,00	
5.1.1.01.11	Tunjangan badan musyawarah	21.010.500,00	
5.1.1.01.12	Tunjangan komisi	38.367.000,00	
5.1.1.01.13	Tunjangan badan anggaran	18.818.100,00	
5.1.1.01.14	Tunjangan badan kehormatan	5.663.700,00	
5.1.1.01.17	Uang duka wafat / tewas	105.540.218,00	
5.1.1.01.18	Uang jasa pengabdian	239.085.000,00	
5.1.1.01.21	Tunjangan Papua	13.899.922.500,00	
5.1.1.01.22	Tunjangan Daerah Terpencil	3.541.387.500,00	
5.1.1.01.23	Iuran Wajib Asuransi Kesehatan	4.940.062.817,00	
5.1.1.01.25	Tunjangan Badan Pembentukan Perda	31.972.500,00	
5.1.1.01.26	Tunjangan Pansus	22.106.700,00	
5.1.1.01.27	Tunjangan Insentif Reses Anggota DPRD	1.102.500.000,00	
5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	166.154.586.026,00	
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	54.644.586.026,00	
5.1.1.02.02	Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas	81.650.400.000,00	
5.1.1.02.03	Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja	12.362.400.000,00	
5.1.1.02.04	Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi	17.317.200.000,00	
5.1.1.02.05	Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja	180.000.000,00	
5.1.1.03	Belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH / WKDH	5.122.480.000,00	
5.1.1.03.01	Belanja Tunjangan komunikasi Intensif Pimpinan dan anggota DPRD	4.410.000.000,00	
5.1.1.03.02	Belanja penunjang operasional KDH / WKDH	400.000.000,00	
5.1.1.03.04	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00	
5.1.3	Belanja subsidi	2.800.000.000,00	
5.1.3.01	Belanja subsidi kepada perusahaan / lembaga	2.800.000.000,00	
5.1.3.01.01	Belanja Subsidi kepada Yayasan / Perusahaan Penerbangan	2.800.000.000,00	
5.1.4	Belanja hibah	27.000.000.000,00	
5.1.4.05	Belanja hibah kepada Badan/lembaga/organisasi	27.000.000.000,00	
5.1.4.05.01	Badan / Lembaga / Organisasi	23.500.000.000,00	
5.1.4.05.02	Komisi Pemilihan Umum Daerah	3.500.000.000,00	
5.1.5	Belanja bantuan sosial	36.000.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 1 . 5 . 01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Sosial Kemasyarakatan	15.000.000.000,00	
5 . 1 . 5 . 01 . 01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Sosial Kemasyarakatanâ€	15.000.000.000,00	
5 . 1 . 5 . 03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	21.000.000.000,00	
5 . 1 . 5 . 03 . 01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Pelajar SD, SLTP, SLTA, dan Mahasiswa	21.000.000.000,00	
5 . 1 . 7	Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/ kota dan pemerintahan	342.957.193.127,66	
5 . 1 . 7 . 03	Belanja bantuan keuangan kepada desa	342.098.531.927,66	
5 . 1 . 7 . 03 . 01	Belanja bantuan keuangan kepada desaâ€	342.098.531.927,66	
5 . 1 . 7 . 05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	858.661.200,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	858.661.200,00	
5 . 1 . 8	Belanja tidak terduga	500.000.000,00	
5 . 1 . 8 . 01	Belanja tidak terduga	500.000.000,00	
5 . 1 . 8 . 01 . 01	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	
5 . 2	Belanja Langsung	952.550.400.007,39	
5 . 2 . 1	Belanja pegawai	132.144.322.100,00	
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.485.665.000,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.706.690.000,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	164.840.000,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	7.614.135.000,00	
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium non PNS	116.291.751.100,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.567.861.100,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap	52.179.220.000,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Driver	2.990.400.000,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Peserta Kegiatan	2.361.170.000,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium Guru Bantu	10.171.200.000,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 06	Honorarium Guru Kontrak	13.472.000.000,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 07	Insentif Paramedis dan Medis	31.549.900.000,00	
5 . 2 . 1 . 03	Uang lembur	3.366.906.000,00	
5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.366.906.000,00	
5 . 2 . 2	Belanja barang dan jasa	507.362.298.667,31	
5 . 2 . 2 . 01	Belanja bahan pakai habis	89.667.022.478,26	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat tulis kantor	9.093.318.877,45	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat listrik / elektronik	259.047.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	570.580.000,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	391.448.000,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja bahan bakar minyak / gas	73.396.138.195,94	
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	546.108.557,87	
5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan Kerja	3.205.230.347,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi dan Hias	651.500.000,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kantor	59.340.000,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Peralatan Rumah Tangga	1.494.311.500,00	
5 . 2 . 2 . 02	Belanja bahan / material	22.552.660.157,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja bahan / bibit tanaman	78.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-obatan	22.076.543.157,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia	120.735.000,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Pelatihan dan Perlombaan	63.476.000,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Peralatan Kerja	213.906.000,00	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja jasa kantor	30.500.180.303,88	
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	3.600.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.737.965.916,88	
5 . 2 . 2 . 03 . 04	Belanja surat kabar / majalah	490.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja kawat / faksimili / internet	2.925.900.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja paket / pengiriman	2.398.574.600,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja sertifikasi	55.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 11	Belanja Jasa Pihak Ketiga	17.730.729.787,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Piala / Piagam		
5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	5.158.410.000,00	
5 . 2 . 2 . 04	Belanja premi asuransi	231.560.900,00	
5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja premi asuransi kesehatan	231.560.900,00	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	2.559.836.000,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja jasa service	2.479.271.000,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja penggantian suku cadang	16.796.000,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja surat tanda nomor kendaraan	63.769.000,00	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja cetak dan penggandaan	10.649.032.069,69	
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	3.882.716.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja penggandaan	6.766.316.069,69	
5 . 2 . 2 . 07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	1.882.370.000,00	
5 . 2 . 2 . 07 . 01	Belanja sewa rumah / jabatan / rumah dinas	921.570.000,00	
5 . 2 . 2 . 07 . 02	belanja sewa gedung / kantor / tempat	920.800.000,00	
5 . 2 . 2 . 07 . 03	belanja sewa ruang rapat / pertemuan	40.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 08	Belanja sewa sarana mobilitas	7.754.310.000,00	
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	776.060.000,00	
5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja sewa sarana mobilitas air	6.978.250.000,00	
5 . 2 . 2 . 10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	185.250.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	5.750.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja sewa generator	6.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 05	belanja sewa tenda	18.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa Sound System	148.500.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Lainnya	7.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja makanan dan minuman	67.288.506.000,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5.096.246.000,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.042.591.000,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	7.424.572.000,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman peserta kegiatan	5.558.190.000,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Pasien	28.624.907.000,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 08	Makan dan Minum Siswa	10.542.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	574.955.000,00	
5 . 2 . 2 . 12 . 01	Belanja pakaian dinas KDH dan WKDH	225.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 12 . 05	Belanja pakaian dinas upacara (PDU)	349.955.000,00	
5 . 2 . 2 . 13	Belanja pakaian kerja	29.620.000,00	
5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja pakaian kerja lapangan	29.620.000,00	
5 . 2 . 2 . 14	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.116.800.000,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	15.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olah raga	101.800.000,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja Pakaian Layak Pakai	2.000.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja perjalanan dinas	141.915.986.500,00	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	61.622.806.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	80.293.180.500,00	
5 . 2 . 2 . 16	Belanja beasiswa pendidikan PNS	1.828.500.000,00	
5 . 2 . 2 . 16 . 02	Belanja Beasiswa tugas belajar D3	10.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 16 . 03	Belanja Beasiswa tugas belajar S1	1.718.500.000,00	
5 . 2 . 2 . 16 . 04	Belanja Beasiswa tugas belajar S2	100.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.118.849.268,00	
5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja sosialisasi	1.088.249.268,00	
5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja bimbingan teknis	30.600.000,00	
5 . 2 . 2 . 18	Belanja perjalanan pindah tugas	300.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 18 . 01	Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah	300.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 19	Belanja pemulangan pegawai	200.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 19 . 02	Belanja pemulangan pegawai yang pensiun luar daerah	200.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.627.316.081,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	142.915.500,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor		
5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	780.869.000,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Alat Transportasi Kantor	1.722.800.000,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Mesin Kantor	991.417.581,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pengadaan Suku Cadang	1.197.564.000,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan Hardware dan Software	791.750.000,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja Pemeliharaan Drainase		
5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja Pemeliharaan Mesin		
5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	836.020.000,00	
5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Pihak Ketiga	836.020.000,00	
5 . 2 . 2 . 23	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang akan di serahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	118.408.273.909,48	
5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang akan di serahkan kepada masyarakat	98.057.848.095,80	
5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang akan di serahkan kepada pihak ketiga	20.350.425.813,68	
5 . 2 . 2 . 25	Belanja Cenderamata	1.135.250.000,00	
5 . 2 . 2 . 25 . 01	Belanja pembelian patung, ukiran dan souvenir	1.135.250.000,00	
5 . 2 . 3	Belanja modal	313.043.779.240,08	
5 . 2 . 3 . 01	Belanja modal pengadaan tanah	1.184.980.368,37	
5 . 2 . 3 . 01 . 01	Belanja Modal Pengadaan Tanah kantor	1.184.980.368,37	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 2 . 3 . 02	Belanja modal pengadaan alat- alat berat	828.857.000,00	
5 . 2 . 3 . 02 . 02	Belanja Modal Pengadaan bulldoser		
5 . 2 . 3 . 02 . 04	Belanja Modal Pengadaan eskavator		
5 . 2 . 3 . 02 . 10	Belanja Modal Pengadaan Tangki BBM		
5 . 2 . 3 . 02 . 12	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pembasmi Limbah		
5 . 2 . 3 . 02 . 13	Belanja Modal Pengadaan Genset Listrik	828.857.000,00	
5 . 2 . 3 . 03	Belanja modal pengadaan alat- alat angkutan darat bermotor	140.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 03 . 12	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda motor	140.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 04	Belanja modal pengadaan alat- alat angkutan darat tidak bermotor	28.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 04 . 01	Belanja Modal Pengadaan Gerobak	28.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 05	Belanja modal pengadaan alat- alat angkutan di air bermotor	2.176.991.000,00	
5 . 2 . 3 . 05 . 03	Belanja Modal Pengadaan speed boat	2.176.991.000,00	
5 . 2 . 3 . 08	Belanja modal pengadaan alat- alat bengkel	12.700.000,00	
5 . 2 . 3 . 08 . 04	Belanja Modal Pengadaan Mesin kompresor	5.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 08 . 06	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel Tekstil	1.700.000,00	
5 . 2 . 3 . 08 . 07	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel Bangunan	6.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 09	Belanja modal pengadaan alat- alat pengolahan pertanian dan peternakan	200.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 09 . 01	Belanja Modal Pengadaan penggiling hasil pertanian	200.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 09 . 08			
5 . 2 . 3 . 10	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	420.224.000,00	
5 . 2 . 3 . 10 . 01	Belanja Modal Pengadaan Mesin tik		
5 . 2 . 3 . 10 . 11	Belanja Modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran	93.302.000,00	
5 . 2 . 3 . 10 . 13	Belanja Modal Pengadaan Mesin potong rumput	31.744.000,00	
5 . 2 . 3 . 10 . 19	Belanja Modal Pengadaan Mesin Kapal/Speed Boat/Loang Boat	295.178.000,00	
5 . 2 . 3 . 11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	1.441.743.000,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja Modal Pengadaan almari	492.510.000,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 03	Belanja Modal Pengadaan brankas	130.771.000,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 05	Belanja Modal Pengadaan white board	35.302.000,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 07	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	151.847.000,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja Modal Pengadaan Kursi	596.487.000,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 11	Belanja Modal Pengadaan Box	76.000,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 12	Belanja Modal Pengadaan Tiang Bendera diluar Ruangan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 2 . 3 . 11 . 13	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama	34.750.000,00	
5 . 2 . 3 . 12	Belanja modal pengadaan komputer	4.088.445.300,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 01	Belanja Modal Pengadaan Komputer mainframe/server	539.511.300,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	744.393.000,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja Modal Pengadaan Printer	593.387.000,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 08	Belanja Modal Pengadaan UPS	95.503.000,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 10	Belanja Modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	15.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 11	Belanja Modal Pengadaan Software	293.500.000,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 12	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Internet	1.807.151.000,00	
5 . 2 . 3 . 13	Belanja modal pengadaan mebeulair	4.646.421.500,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	935.233.000,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	48.994.000,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	110.169.000,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 07	Belanja Modal Pengadaan tempat tidur	80.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 08	Belanja Modal Pengadaan sofa	92.798.000,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 09	Belanja Modal Pengadaan rak buku/tv/kembang	736.217.000,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 12	Belanja modal pengadaan Meubelair lainnya	2.643.010.500,00	
5 . 2 . 3 . 14	Belanja modal pengadaan peralatan dapur	174.952.500,00	
5 . 2 . 3 . 14 . 04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	36.762.500,00	
5 . 2 . 3 . 14 . 05	Belanja Modal Pengadaan kulkas	40.537.000,00	
5 . 2 . 3 . 14 . 08	Belanja Modal Pengadaan Penampungan Air Hujan	91.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 14 . 10	Belanja Modal Pengadaan Kulkas / Freezer	5.853.000,00	
5 . 2 . 3 . 14 . 13	Belanja Modal Oven / Microwave	800.000,00	
5 . 2 . 3 . 15	Belanja modal pengadaan penghias ruangan / perlengkapan rumah tangga	919.923.318,00	
5 . 2 . 3 . 15 . 02	Belanja Modal Pengadaan Jam dinding / meja	8.576.000,00	
5 . 2 . 3 . 15 . 03	Belanja Modal Pengadaan kain tirai / Gorden	203.848.000,00	
5 . 2 . 3 . 15 . 06	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	42.562.000,00	
5 . 2 . 3 . 15 . 07	Belanja Modal Pengadaan Alat Kamar Mandi	39.497.668,00	
5 . 2 . 3 . 15 . 09	Belanja Modal Pengadaan AC	607.039.650,00	
5 . 2 . 3 . 15 . 12	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci	18.400.000,00	
5 . 2 . 3 . 16	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	613.721.000,00	
5 . 2 . 3 . 16 . 01	Belanja Modal Pengadaan kamera	16.910.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 2 . 3 . 16 . 03	Belanja Modal Pengadaan proyektor	191.577.000,00	
5 . 2 . 3 . 16 . 06	Belanja Modal Pengadaan Televisi	368.758.000,00	
5 . 2 . 3 . 16 . 07	Belanja Modal Pengadaan Sound System	36.476.000,00	
5 . 2 . 3 . 18	Belanja modal pengadaan alat-alat ukur	83.583.000,00	
5 . 2 . 3 . 18 . 01	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	83.583.000,00	
5 . 2 . 3 . 19	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran	4.022.315.600,00	
5 . 2 . 3 . 19 . 01	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran umum	3.784.412.600,00	
5 . 2 . 3 . 19 . 02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran gigi	166.950.000,00	
5 . 2 . 3 . 19 . 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran THT	2.199.000,00	
5 . 2 . 3 . 19 . 05	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah	9.539.000,00	
5 . 2 . 3 . 19 . 13	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat farmasi	53.938.000,00	
5 . 2 . 3 . 19 . 14	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat penyakit dalam/internis	5.277.000,00	
5 . 2 . 3 . 20	Belanja modal pengadaaan alat-alat aboratorium	2.033.363.739,00	
5 . 2 . 3 . 20 . 01	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Labolatorium Biologi	1.214.026.739,00	
5 . 2 . 3 . 20 . 09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat peraga/praktik sekolah	224.337.000,00	
5 . 2 . 3 . 20 . 10	Belanja Modal Pengadaan Laboratorium Kesehatan	595.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 21	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	36.060.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 21 . 01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan		
5 . 2 . 3 . 21 . 04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Landasan Pacu	36.060.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 22	Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan	55.670.414.121,03	
5 . 2 . 3 . 22 . 06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Jembatan	55.670.414.121,03	
5 . 2 . 3 . 23	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air	57.262.629.023,83	
5 . 2 . 3 . 23 . 06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan air bersih/air minum	10.495.827.023,83	
5 . 2 . 3 . 23 . 07	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Reservoir		
5 . 2 . 3 . 23 . 09	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi talut	6.766.802.000,00	
5 . 2 . 3 . 23 . 11	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	40.000.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 25	Belanja modal pengadaan instalasi listrik dan telepon	8.586.936.999,64	
5 . 2 . 3 . 25 . 01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	8.586.936.999,64	
5 . 2 . 3 . 26	Belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian *) bangunan	132.281.321.770,21	
5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian gedung kantor	75.910.635.643,10	
5 . 2 . 3 . 26 . 03	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian rumah dinas	19.457.279.157,60	
5 . 2 . 3 . 26 . 04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian gedung gudang		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 2 . 3 . 26 . 08	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian Lapangan Upacara	276.586.404,00	
5 . 2 . 3 . 26 . 17	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pembuatan Pagar	1.748.590.000,00	
5 . 2 . 3 . 26 . 18	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pembuatan Dermaga	11.847.393.358,00	
5 . 2 . 3 . 26 . 19	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Rehab Gedung Kantor/Rumah Dinas	8.943.776.203,51	
5 . 2 . 3 . 26 . 21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pasar/Toko/Kios	1.449.871.440,00	
5 . 2 . 3 . 26 . 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan/Ruang	758.568.794,00	
5 . 2 . 3 . 26 . 23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Gedung Sekolah	11.888.620.770,00	
5 . 2 . 3 . 27	Belanja modal pengadaan buku / kepustakaan	166.256.000,00	
5 . 2 . 3 . 27 . 10	Belanja Modal Pengadaan Buku keagamaan	4.470.000,00	
5 . 2 . 3 . 27 . 13	Belanja Modal Pengadaan Buku ilmu pengetahuan umum	121.786.000,00	
5 . 2 . 3 . 27 . 21	Belanja Modal Pengadaan Buku peraturan dan perundang-undangan	23.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 27 . 25	Belanja Modal Pengadaan peta/atlas/globe	17.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)		
6	PEMBIAYAAN		
6 . 1	Penerimaan Pembiayaan Daerah		
6 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya		
6 . 1 . 1 . 01	Pelampauan penerimaan PAD		
6 . 1 . 1 . 01 . 01	Pajak Daerah		
6 . 1 . 1 . 01 . 02	Restribusi Daerah		
6 . 1 . 1 . 01 . 03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
6 . 1 . 1 . 01 . 04	Lain-lain PAD yang sah		
6 . 1 . 1 . 02	Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan		
6 . 1 . 1 . 02 . 02	Bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam		
6 . 1 . 1 . 03	Pelampauan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
6 . 1 . 1 . 03 . 01	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah		
6 . 1 . 1 . 04	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya		
6 . 1 . 1 . 04 . 01	Belanja pegawai dari Belanja Tidak Langsung		
6 . 1 . 1 . 04 . 02	Belanja pegawai dari Belanja Langsung		
6 . 1 . 1 . 04 . 03	Belanja Barang dan jasa		
6 . 1 . 1 . 04 . 04	Belanja Modal		
6 . 1 . 1 . 04 . 06	Belanja Subsidi		
6 . 1 . 1 . 04 . 07	Belanja Hibah		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
6 . 1 . 1 . 04 . 08	Belanja Bantuan Sosial		
6 . 1 . 1 . 04 . 10	Belanja Bantuan keuangan		
6 . 1 . 1 . 04 . 11	Belanja tidak terduga		
6 . 1 . 1 . 06	Kegiatan Lanjutan		
6 . 1 . 1 . 06 . 01	Kegiatan Lanjutanâ€¦		
6 . 1 . 1 . 07	Belanja yang dibatasi penggunaannya		
6 . 1 . 1 . 07 . 01	Belanja yang dibatasi penggunaannya		
6 . 1 . 2	Pencairan Dana Cadangan		
6 . 1 . 2 . 01	Pencairan Dana Cadangan		
6 . 1 . 2 . 01 . 01	Pencairan Dana Cadangan		
6 . 1 . 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
6 . 1 . 3 . 01	Hasil penjualan Kekayaan milik daerah/BUMN		
6 . 1 . 3 . 01 . 01	BUMD...		
6 . 1 . 4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah		
6 . 1 . 4 . 01	Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah		
6 . 1 . 4 . 01 . 01	Penerus pinjaman...		
6 . 1 . 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
6 . 1 . 5 . 01	Penerimaan kembali penerimaan pinjaman		
6 . 1 . 5 . 01 . 01	Penerimaan kembali penerimaan pinjaman...		
6 . 1 . 6	Penerimaan Piutang Daerah		
6 . 1 . 6 . 01	Penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah		
6 . 1 . 6 . 01 . 01	Penerimaan Piutang daerah dari pendapatan pajak daerah		
6 . 2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
6 . 2 . 1	Pembentukan Dana Cadangan		
6 . 2 . 1 . 01	Pembentukan dana cadangan		
6 . 2 . 1 . 01 . 01	Pembentukan Dana Cadangan Nomor...		
6 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
6 . 2 . 2 . 01	Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN)		
6 . 2 . 2 . 01 . 01	BUMN...		
6 . 2 . 3	Pembayaran Pokok Utang		
6 . 2 . 3 . 01	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah		
6 . 2 . 3 . 01 . 01	Penerus pinjaman...		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
6 . 2 . 4 6 . 2 . 4 . 01 6 . 2 . 4 . 01 . 01	Pemberian Pinjaman Daerah Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah pemerintah PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	11.543.461,00	



Salinan sesuai dengan aslinya

a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT
KEPALA BAGIAN HUKUM

YOSINA N.M. RUMAIKEWI, SH., M.Si.
PEMBINA
NIP. 19771108 200312 2 007

AGATS, 13 Desenber 2018

BUPATI ASMAT

TTD

ELISA KAMBU